SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Australian Government

Buklet Cerita

SEPAKAT untuk Perencanaan yang Lebih Tepat Sasaran:

Cerita Pemanfaatan Data dari Berbagai Daerah



NOVEMBER 2026

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran makin menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan mudah dimanfaatkan. Program pembangunan tidak cukup hanya dirancang berdasarkan asumsi umum, tetapi perlu didukung pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat, wilayah, serta kelompok yang paling rentan.

Data menjadi penting karena membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan memahami persoalan secara lebih jelas: siapa yang membutuhkan dukungan, di mana mereka berada, bagaimana kondisi sosial ekonominya, bagaimana ketersediaan dan akses ke layanan dasarnya, serta intervensi apa yang paling relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan pemanfaatan data yang lebih baik, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data sosial ekonomi yang terintegrasi. DTSEN menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

Melalui platform SEPAKAT, data sosial ekonomi tersebut dapat diterjemahkan menjadi analisis yang lebih mudah digunakan pemerintah pusat dan daerah. SEPAKAT membantu pemangku kepentingan memahami kondisi masyarakat, mengidentifikasi kelompok rentan, menentukan prioritas program, dan merancang intervensi yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, data tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelengkap administrasi, tetapi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Kisah-kisah pemanfaatan SEPAKAT di berbagai daerah menunjukkan bagaimana data dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata. Dari layanan orang lanjut usia (lansia) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, advokasi penyandang disabilitas di Maluku, penyaluran bantuan sosial di Nusa Tenggara Timur, hingga program perumahan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah, data menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap intervensi menjangkau mereka yang paling membutuhkan.



Transformasi Pendataan dan Layanan Lansia di Lombok Timur

Di Posyandu Lansia Rumah Senja, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pemanfaatan data untuk meningkatkan layanan lansia bermula dari keikutsertaan para pengelolanya dalam sebuah lokakarya pada akhir 2024. Tiga perwakilan Rumah Senja, yakni Saadah, Ella Laila Herawati, dan Kusyati, mengikuti pelatihan tersebut untuk mempelajari pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan SEPAKAT dalam perencanaan layanan sosial. Pada awalnya, mereka mengaku kesulitan memahami berbagai data yang disajikan karena belum terbiasa menggunakannya.



> “Awalnya bingung, kok, banyak sekali data. Kami belum terbiasa membaca data seperti itu. Tapi, setelah dijelaskan, kami jadi tahu ternyata data itu bisa membantu kami memahami kondisi lansia.

Saadah, Peserta Pelatihan Regsosek dan SEPAKAT dari Rumah Senja, Nusa Tenggara Barat

Sepulang dari pelatihan, pendataan yang sebelumnya hanya mencakup identitas dasar dikembangkan menjadi lebih komprehensif. Saadah, Ella, dan Kusyati turun langsung untuk menggali informasi mengenai kondisi administrasi, kesehatan, dan sosial ekonomi lansia. Upaya ini diperkuat melalui kerja sama dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan. Dengan data yang lebih lengkap, Rumah Senja kini mampu memetakan kondisi dan kebutuhan lansia secara lebih terperinci.

“Sekarang kami tahu kondisi masing-masing lansia. Ada yang harus dirawat di rumah, ada yang cukup dipantau, ada juga yang hanya butuh dikunjungi,” kata Ella.

Pemanfaatan data membawa perubahan signifikan dalam pendekatan layanan Rumah Senja, dari pemberian bantuan yang seragam dan lebih didorong rasa iba menjadi layanan berbasis kebutuhan dan pemenuhan hak. “Dulu kami memberikan bantuan karena kasihan, jadi semua mendapat hal yang sama,” ujar Saadah. “Sekarang tidak lagi. Kami lihat datanya dulu, siapa butuh apa.”

Data juga dimanfaatkan sebagai alat advokasi ketika Rumah Senja berkomunikasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah. “Kalau dulu kami hanya menyampaikan secara lisan, sekarang kami bisa menunjukkan datanya. Jadi lebih kuat,” kata Kusyati.

Advokasi berbasis data tersebut membantu Rumah Senja mengusulkan jaminan kesehatan atau pengurusan dokumen administrasi bagi lansia yang membutuhkan. Pendekatan di lapangan pun menjadi lebih kontekstual. Para kader tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan sumber daya di komunitas.

Pemanfaatan Data untuk Layanan yang Lebih Inklusif

Di Maluku, data analisis SEPAKAT dimanfaatkan Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk mendukung advokasi dan perencanaan program. Pendeta Yohanna Maitimu mendorong penggunaan data agar gereja semakin memahami kondisi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

GPM mengenal dan mulai mengadopsi SEPAKAT melalui inisiatif Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sinode GPM. Pada September 2022, Balitbang mengajak Bappenas bekerja sama untuk memperkuat kapasitas perencanaan gereja. GPM kemudian memanfaatkan SEPAKAT untuk merumuskan Pola Induk Pelayanan (PIP) dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) periode 2025–2035 agar program-program gereja lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran bagi jemaat. Kedua dokumen tersebut menjadi semacam “Bappeda-nya gereja” yang memandu arah pelayanan GPM menuju usia seabad.

> “Sebelum ada data ini, kami seperti meraba-raba. Kami tidak tahu pasti apakah kelompok rentan itu ada dan di mana mereka berada.
>
> **Yohanna Maitimu**, Pendeta Gereja Protestan Maluku



Dengan tersedianya data, gereja mulai memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah, persebaran, kondisi, dan kebutuhan kelompok rentan.

“Ketika datanya terlihat, kami jadi sadar bahwa mereka ada dan perlu diperhatikan secara serius,” kata Pendeta Yohanna, yang merupakan penyandang disabilitas netra.

Pemanfaatan data juga mendorong perubahan cara pandang gereja terhadap kelompok rentan. Penyandang disabilitas tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi dilibatkan secara aktif dalam kehidupan dan kegiatan gereja.

Analisis SEPAKAT membantu gereja memahami jumlah, kategori, dan persebaran penyandang disabilitas. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun program yang lebih terarah dan mengurangi stigma di kalangan jemaat. “Kami juga menggunakan data ini untuk mengedukasi jemaat bahwa disabilitas bukan kutukan, tetapi bagian dari realitas sosial yang harus direspons dengan inklusi,” tambah Yohanna.

“Mereka bukan hanya objek layanan, tetapi juga subjek yang punya suara. Kami mulai melibatkan mereka dalam kegiatan gereja, bahkan dalam diskusi dan penyusunan materi,” tutur Yohanna.

Data untuk Pengambilan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti

Pengalaman Rumah Senja di NTB dan Gereja Protestan Maluku menunjukkan bagaimana data dapat mengubah cara organisasi dan komunitas memahami kebutuhan kelompok rentan. Namun, pemanfaatan SEPAKAT tidak berhenti di tingkat komunitas. Di berbagai daerah, platform ini juga makin banyak digunakan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, penargetan program, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Perumahan

Di Provinsi Maluku, SEPAKAT dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program unggulan daerah “Manggurebe Bikin Bae Rumah”. Program berbasis gotong royong ini bertujuan memperbaiki rumah tidak layak huni sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Woody Timisela, menjelaskan bahwa data SEPAKAT menjadi rujukan utama dalam mengidentifikasi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni.

Data tersebut melengkapi informasi mengenai kondisi fisik rumah yang sebelumnya telah dihimpun melalui aplikasi pendataan elektronik Rumah Tidak Layak Huni (e-RTLH). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dapat mengidentifikasi rumah yang membutuhkan perbaikan, tetapi juga memahami kondisi sosial ekonomi keluarga yang menghuninya.

Pemanfaatan data membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat. Dari sekitar 6.000 rumah tidak layak huni yang teridentifikasi sebagai basis awal, pemerintah melakukan penentuan prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan keluarga dan status kepemilikan rumah atau lahan, yang kemudian

dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lapangan. Proses ini menghasilkan penetapan 204 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di lima kabupaten/kota pada 2025.

Pemanfaatan data juga berlanjut hingga tahap pemantauan pelaksanaan program. Melalui Dashboard Eksekutif Lawamena Satu Data, pemerintah dapat memantau lokasi penerima manfaat, kondisi rumah sebelum dan sesudah perbaikan, perkembangan pekerjaan, serta realisasi anggaran. Dengan demikian, data tidak hanya digunakan untuk menentukan sasaran bantuan, tetapi juga untuk memantau kemajuan pelaksanaan dan memperkuat akuntabilitas program.



> Kami menggunakan data SEPAKAT sebagai rujukan utama untuk mengidentifikasi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni. Datanya sudah tersedia sampai *by name by address* berdasarkan Tingkat.

Woody Timisela, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Pemanfaatan data hingga tingkat individu tersebut membantu pemerintah daerah memastikan bantuan perumahan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Cerita serupa datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Maria Vivi Proyanti Taboi, Penyuluh Sosial Ahli Pertama di Dinas Sosial Provinsi NTT, memanfaatkan SEPAKAT untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial bagi kelompok kemiskinan ekstrem.

Pada 2024, Pemerintah Provinsi NTT menerima dana insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah melakukan analisis menggunakan SEPAKAT.

“Dari hasil analisis SEPAKAT, kami kemudian memilah data berdasarkan kelompok umur, desil kesejahteraan, serta kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia,” tutur Yanti.

Pendekatan tersebut terbukti efektif. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyaluran bantuan sosial tahun 2024 tidak mencatat temuan seperti pada tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah daerah menerapkan pendekatan yang sama pada Program Bantuan Rumah Layak Huni yang direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp157 miliar pada tahun anggaran 2026.

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Di Kalimantan Utara (Kaltara), SEPAKAT membantu pemerintah daerah memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Debby Delfiani, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kaltara, mengungkapkan bahwa keterbatasan data kelompok rentan selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penyusunan kebijakan.

Setelah pelatihan SEPAKAT pada 2024, pemanfaatan platform tersebut berkembang dari sekadar analisis kemiskinan menjadi alat untuk menyusun Rencana Aksi Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Anak Tidak Sekolah. Hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Kalimantan Utara juga memanfaatkan SEPAKAT untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Vokasi sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Cici Tri Yulita, Perencana Ahli Pertama di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapperida Kaltara, mengatakan bahwa ia menggunakan data dan analisis di SEPAKAT untuk menelusuri lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kaltara yang telah berwirausaha sendiri.



> “Datanya lengkap: berapa yang berwirausaha sendiri, berapa yang diserap industri, bekerja di bidang apa saja, hingga apakah dia penyandang disabilitas atau tidak.

Cici Tri Yulita, Perencana Ahli Pertama di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapperida Kaltara

Data tersebut kemudian diselaraskan dengan data *tracer study* dari Dinas Pendidikan. *Tracer study* mencatat jurusan dengan tingkat penyerapan lulusan yang tinggi di pasar kerja, jurusan dengan angka pengangguran tinggi, serta kualitas lulusan SMK menurut dunia usaha dan industri. Berdasarkan analisis itu, dalam RAD, Dinas Pendidikan akan merekomendasikan moratorium atau pelatihan ulang (*reskilling*) bagi jurusan tertentu agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Selain untuk menentukan sasaran perlindungan sosial bagi pekerja sawit, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memanfaatkan data sosial ekonomi melalui SEPAKAT untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya program beasiswa bagi masyarakat miskin.

Wahyudi Gobel, analis kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sekaligus dosen di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, menjelaskan bahwa dukungan SKALA dalam penguatan kapasitas penyusunan policy brief dan advokasi kebijakan membantu pemerintah mengembangkan rekomendasi yang lebih berbasis bukti. Melalui SEPAKAT, pemerintah juga dapat mengakses dan menganalisis informasi sosial ekonomi secara lebih terperinci, mulai dari tingkat wilayah hingga individu, termasuk informasi lokasi (geotagging).

Pemanfaatan data tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan beasiswa bagi masyarakat miskin. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan melalui policy brief, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan kebijakan beasiswa yang memprioritaskan masyarakat pada kelompok kesejahteraan terbawah, khususnya desil 1 dan 2. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui platform SEPAKAT digunakan untuk membantu mengidentifikasi calon penerima manfaat sesuai kriteria tersebut.

Menurut Wahyudi, pemanfaatan SEPAKAT juga berlanjut setelah kegiatan penguatan kapasitas. Data dan analisis yang tersedia dalam platform tersebut terus digunakan untuk mendukung pekerjaannya sebagai analis kebijakan, sekaligus menjadi referensi dalam berbagai kajian akademis yang dilakukannya sebagai dosen.

Penggunaan SEPAKAT untuk perlindungan sosial dan kebijakan beasiswa di Gorontalo memperlihatkan bagaimana data sosial ekonomi dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Dengan dukungan kapasitas analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan kelompok sasaran dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bantuan Sosial

Pemanfaatan SEPAKAT juga mendorong kolaborasi lintas sektor di Provinsi Gorontalo. Budi Susanto Yunus, Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, mengungkapkan bahwa platform tersebut menjadi solusi ketika informasi desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi dapat diakses.

> “SEPAKAT menjadi jalan keluar. Melalui data sosial ekonomi mikro di dalamnya, kami bisa melihat kembali siapa yang paling membutuhkan. Ini sangat membantu penentuan skala prioritas.
>
> **Budi Susanto Yunus**, Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo



Data tersebut kemudian dimanfaatkan bersama berbagai perangkat daerah. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mengidentifikasi pekerja sawit rentan yang menjadi sasaran dana bagi hasil (DBH) sawit. Selain itu, data digunakan untuk mendukung kebutuhan informasi bidang perumahan mengenai lansia miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Dalam program DBH sawit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa pembagian DBH selama ini belum menyentuh perlindungan sosial bagi para petani dan buruh sawit miskin. “Selama dua tahun ini, DBH sawit hanya dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” kata Max S. Moerad, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Gorontalo.

Dalam perencanaan 2026, pemerintah memanfaatkan DBH sawit untuk mendukung perlindungan sosial pekerja sawit rentan, dengan mengalokasikan sebagian DBH sawit untuk pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program tersebut telah masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, dengan rencana anggaran Rp183 juta.

Agar lebih tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Gorontalo memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) melalui platform SEPAKAT untuk mengidentifikasi pekerja sawit yang membutuhkan perlindungan sosial. Pendekatan ini penting karena data sektoral yang sebelumnya tersedia lebih banyak mencatat pemilik kebun sawit, sementara program perlindungan sosial juga perlu menjangkau kelompok pekerja yang lebih rentan, termasuk buruh dan pekerja bebas pertanian.

Melalui analisis SEPAKAT, pemerintah menetapkan kriteria penerima manfaat, yaitu tinggal di daerah penghasil sawit, berada pada desil kesejahteraan 1–4, bekerja di sektor perkebunan sebagai buruh atau pekerja bebas pertanian, serta belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan kriteria tersebut, teridentifikasi 2.056 orang yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah tersebut kemudian disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Data final mempersempit sasaran perlindungan sosial provinsi menjadi 818 pekerja sawit rentan, dengan alokasi iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp183 juta.

Pengalaman Gorontalo menunjukkan bagaimana pemanfaatan data sosial ekonomi membantu pemerintah daerah menentukan prioritas penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran. Data tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan sasaran program dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Pemanfaatan SEPAKAT untuk memperkuat perlindungan sosial juga dilakukan di Papua Barat Daya. Di Kabupaten Raja Ampat, pemerintah daerah mengembangkan program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), yang ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP) berusia 65 tahun ke atas. Program ini melanjutkan pembelajaran dari PAITUA,

program perlindungan sosial bagi lansia yang sebelumnya dikelola di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Melihat manfaat program tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengembangkan skema perlindungan sosialnya sendiri melalui ORISUN, dengan rencana alokasi Rp3 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026 untuk sekitar 1.444 calon penerima manfaat.

Program ORISUN diluncurkan oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, di Waisai pada Mei 2026. “Melalui Program ORISUN, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ingin memastikan orang asli Papua yang lanjut usia dapat merasakan kehadiran negara melalui perlindungan sosial yang lebih nyata dan tepat sasaran,” kata Orideko.

Untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok sasaran, pemerintah daerah memadankan data awal calon penerima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui platform SEPAKAT, serta data Sistem Informasi Orang Papua Barat Daya (SIOPADA). Ketiga sumber data tersebut saling melengkapi. Data Dukcapil menjadi rujukan awal identitas dan usia calon penerima, DTSEN melalui SEPAKAT membantu pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi mereka, sementara SIOPADA menyediakan informasi mengenai identitas dan keberadaan OAP hingga tingkat kampung.

Dari sekitar 1.444 calon penerima yang diidentifikasi, hasil pemadanan menunjukkan bahwa sekitar 1.200 orang tercatat dalam DTSEN dan sekitar 600 orang ditemukan dalam SIOPADA. Hasil ini membantu pemerintah mengidentifikasi kesenjangan data dan menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan serta penyempurnaan daftar calon penerima manfaat sebelum program dilaksanakan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan penetapan sasaran ORISUN didukung informasi yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan SEPAKAT di Provinsi Lain

Di Aceh, tim Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menggunakan SEPAKAT untuk menata ulang cakupan jaminan kesehatan. Melalui pemetaan penduduk berdasarkan desil kesejahteraan, tim mengidentifikasi warga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan iuran yang dibiayai pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan anggaran tahunan sebesar Rp850–900 miliar yang dinilai tidak berkelanjutan. Meskipun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 kemudian dicabut menyusul protes masyarakat, Sayid Azhari dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh tetap meyakini manfaat SEPAKAT untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pada masa mendatang.

Sementara itu, di NTB, SEPAKAT telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan strategis daerah. Menurut Irsan Hadiyan, Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi NTB, kemampuan platform ini dalam menyajikan data mikro hingga tingkat individu menjadi nilai tambah yang sangat membantu proses perencanaan.



> Fitur memilah data ini yang paling diunggulkan. Kita bisa tahu *by name by address* di setiap desa, siapa yang masuk desil 1, 2, atau 3, di mana tempat tinggalnya, dan kondisi rumahnya.

Irsan Hadiyan, Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi NTB

Selain mendukung penyusunan RAD Penyandang Disabilitas dan Program Rumah Layak Huni, SEPAKAT saat ini dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program unggulan NTB, yaitu Desa Berdaya. Tabel 1 merangkum sejumlah pemanfaatan SEPAKAT di berbagai provinsi.



Tabel 1. Pemanfaatan SEPAKAT untuk pelaksanaan program berbasis data

Provinsi	Program	Penerima manfaat	Aksi
Maluku 	Manggurebe Bikin Bae Rumah; advokasi dan perencanaan Gereja Protestan Maluku	Masyarakat miskin; pengangguran; penyandang disabilitas	Memperbaiki rumah tidak layak huni; melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam kegiatan gereja
Nusa Tenggara Barat 	Posyandu Lansia Rumah Senja; Desa Berdaya	Lansia; masyarakat miskin	Memetakan kondisi administrasi, kesehatan, dan sosial ekonomi lansia; mendukung kemandirian ekonomi melalui modal usaha, pendampingan, dan akses perbankan
Nusa Tenggara Timur 	Program Bantuan Rumah Layak Huni	Masyarakat miskin ekstrem; masyarakat miskin; kelompok rentan; perempuan kepala keluarga	Memperbarui data penerima bantuan sosial dan bantuan rumah layak huni agar lebih akurat
Kalimantan Utara 	Rencana Aksi Penyandang Disabilitas; Rencana Aksi Anak Tidak Sekolah	Penyandang disabilitas; anak tidak sekolah	Memperkuat perencanaan yang lebih inklusif
Gorontalo 	DBH Sawit	Petani dan pekerja sawit rentan	Mendukung perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Membangun Ekosistem Data yang Berkelanjutan



Seiring makin luasnya pemanfaatan SEPAKAT untuk mendukung layanan sosial dan perencanaan pembangunan daerah, tata kelola data yang kuat menjadi semakin penting. Kapasitas aparatur, integrasi sistem, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan akan menentukan sejauh mana data dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Frederik Koenunu, menilai bahwa integrasi data lintas sektor masih menjadi salah satu tantangan daerah. Menurutnya, keterpaduan sistem antarperangkat daerah diperlukan agar data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas pemanfaatan SEPAKAT juga menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Ke depan, integrasi SEPAKAT dengan dasbor eksekutif daerah diharapkan makin memperkuat budaya pengambilan keputusan berbasis bukti di lingkungan pemerintah. Pengalaman para pengguna SEPAKAT menunjukkan bahwa ketika data tersedia dan mudah dimanfaatkan, proses perencanaan serta layanan menjadi lebih terarah. Seperti diungkapkan Saadah dari Rumah Senja, “Kalau ada data, kita tidak lagi bekerja dengan perkiraan. Semua jadi lebih jelas.”



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Program Kemitraan Australia-Indonesia, Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) merupakan program untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

skala.or.id

communications@skala.or.id